



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN DARMA SETIAWAN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAKASSAR
3. NHK : 267971

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.588.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 930.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 808.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 47.500.000

1. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 225.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.800.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.900.300.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.900.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TOTOK HARTANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 125391

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/192 m2 di KAB / KOTA MALANG, Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 1.426 m2 di KAB / KOTA BLITAR, Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 271.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 2DP R AT / SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 169.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.140.100.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.140.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUSNADI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 798009

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3.740 m2/60 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 183.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, YAMAHA ZUPITER Z BEBEK Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BJ8 W A/T /SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.584.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.584.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ILING SAIDAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 768850

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.547.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 628.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 771.000.000
3. Tanah Seluas 483 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 268.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 294.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI 1K1FZ (4X2)AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000
3. MOTOR, SUZUKI UD11ONE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 227.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 49.071.083**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 21.174.876

Sub Total

Rp. 3.138.745.959

III. HUTANG

Rp. 137.105.966

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.001.639.993

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDAWATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 122485

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 990.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 61.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2000, WARISAN Rp. 1.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 647.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 294.997.800

F. HARTA LAINNYA Rp. 15.000.000

Sub Total Rp. 2.008.497.800

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.008.497.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BASO SYAMSUDDIN
2. Jabatan : PELELANG AHLI MADYA KPKNL JAKARTA IV
3. NHK : 124785

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.544.030.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/182 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/300 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
3. Tanah Seluas 5.087 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 50.870.000
4. Tanah Seluas 20.161 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 201.610.000
5. Tanah Seluas 6.000 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. Tanah Seluas 1.300 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
8. Tanah Seluas 9.000 m2 di KAB / KOTA WAJO, Rp. 90.000.000
9. Tanah Seluas 317 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 317.000.000
10. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



11. Tanah Seluas 1.700 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000

12. Tanah Seluas 4.321 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI
Rp. 216.050.000

13. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp.
144.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **133.900.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

2. MOTOR, HONDA NEW BEAT STREET SEPEDA MOTOR SOLO
Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

3. MOTOR, YAMAHA GRAND FILANO NEO HYBRID Tahun 2024,
HASIL SENDIRI Rp. 23.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **28.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **356.555.645**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **3.062.485.645**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **3.062.485.645**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARMADI
2. Jabatan : PELELANG AHLI MUDA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 145901

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 670.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 67.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, CHAVROLET CAVTIVA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. MOTOR, VIAR SPORT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 751.350.000

III. HUTANG Rp. 155.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 596.350.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARDAT
2. Jabatan : PELELANG AHLI MUDA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 130237

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 840.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 76.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 87.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 252.854.300

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.255.854.300

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.255.854.300

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIESKY RENATA JULINA
2. Jabatan : PELELANG AHLI MUDA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 432131

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	870.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 870.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	343.000.000
1. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.5 G Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000		
3. MOTOR, HONDA V1J02Q32L2 A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA BXY-K A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	34.400.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.269.400.000
III. HUTANG	Rp.	208.482.890
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.060.917.110

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASRIANI NINGSIH
2. Jabatan : PELELANG AHLI PERTAMA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 130109

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	291.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 291.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	51.000.000
1. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	161.450.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	578.450.000
III. HUTANG	Rp.	736.050.857
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-157.600.857

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FARID MAHMUDI
2. Jabatan : PELELANG AHLI PERTAMA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 182635

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.265.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/140 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 1.359 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 995 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI , Rp. 145.000.000
5. Tanah Seluas 2.008 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI , Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 202.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 34.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.639.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.639.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRNAWATY SANGAJI
2. Jabatan : PELELANG AHLI PERTAMA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 456184

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	38.350.000
1. MOTOR, YAMAHA MX 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.		
9.500.000		
2. MOTOR, NMAX ALL NEW NMAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.		
28.850.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	89.439.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	24.192.776
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	151.981.776
III. HUTANG	Rp.	452.863.846
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-300.882.070

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LA MILI
2. Jabatan : PELELANG AHLI PERTAMA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 157564

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	130.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/121 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	195.500.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH G SPROT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	332.300.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	332.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : POUNDRA PANDU PANDAWA
2. Jabatan : PELELANG AHLI PERTAMA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 783484

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	194.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH TRD SPROTIVO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
2. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.081.438
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.026.081.438
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.026.081.438

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHMAD MUNIF**
2. Jabatan : **JURU SITA PIUTANG NEGARA KPKNL MAKASSAR**
3. NHK : **764770**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 990.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 990.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 121.450.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA TYPE E Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, SUZUKI SMASH FD 110 XCSD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 450.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.050.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.408.287

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.125.908.287

III. HUTANG Rp. 266.326.070

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 859.582.217

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GEDE ABDI NEGARA
2. Jabatan : JURU SITA PIUTANG NEGARA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 428084

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	370.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/32 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	4.000.000
1. MOTOR, SUZUKI JUPITER MX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.350.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	377.350.000

III. HUTANG **Rp.** **95.706.253**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **281.643.747**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUL RATU LOLY
2. Jabatan : JURU SITA PIUTANG NEGARA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 430899

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/90 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 313 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 17.000.000

1. MOTOR, YAMAHA YAMAHA VEGA R Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT METIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 67.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 89.499.769

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 473.999.769

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 473.999.769

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HASNUR SAHATI
2. Jabatan : BENDAHARA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 173072

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	620.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	27.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	111.503
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	649.611.503

III. HUTANG **Rp.** **585.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **64.611.503**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU BINTORO
2. Jabatan : PELELANG AHLI PERTAMA KPKNL MAKASSAR
3. NHK : 187568

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	725.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	30.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	767.000.000
III. HUTANG	Rp.	624.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	143.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.